

Bab 3

Sumber Daya Manusia

3.1. Pendahuluan

Statistik sumber daya manusia menggambarkan jumlah dan komposisi pegawai di Ditjen SDPPI pada semua unit kerja didalamnya (Sekretariat Direktorat Jenderal SDPPI, Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis) serta pegawai dari Direktorat Jenderal SDPPI yang diperbantukan di instansi lain atau unit kerja lain di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Statistik ini juga menggambarkan distribusi pegawai menurut tingkat pendidikan dan penjenjangan pegawai (eselon) untuk menunjukkan respon dari sisi perangkat pegawai terhadap beban tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan fungsi regulasi. Hal ini diperlukan mengingat perkembangan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan melibatkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam buku ini juga mulai dibandingkan perkembangan jumlah pegawai menurut unit kerja antara kondisi tahun 2011 dengan semester 1 tahun 2012 karena kelembagaan Ditjen SDPPI sudah berusia lebih dari satu tahun.

Perkembangan pada bidang pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika harus diikuti dengan kemampuan pengaturan dan didukung dengan sumberdaya manusiayang lebih baik. Sehingga perkembangannya dapat sesuai dengan arah yang diinginkan serta sejalan dengan kepentingan publik. Salah satu unsur perangkat pengaturan ini adalah pegawai di instansi pemerintah yang menjalankan fungsi regulator dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika di Indonesia. Kondisi dan komposisi kepegawaian dalam satu unit kerja menggambarkan daya dukung yang dimiliki oleh unit kerja tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi dan komposisi tersebut juga mencerminkan kemampuan pelayanan unit kerja tersebut, termasuk unit-unit kerja di dalam lingkup Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

3.2. Jumlah Pegawai

Sampai dengan posisi tanggal 30 Juni 2012, jumlah pegawai yang berada di bawah Direktorat Jenderal SDPPI berjumlah 1380 orang atau berkurang sebanyak 9 orang dibandingkan posisi pada akhir tahun 2011. Berkurangnya jumlah pegawai ini terkait dengan penugasan dari pegawai yang ada ke unit kerja yang lain serta adanya pegawai di Direktorat Jenderal SDPPI yang memasuki masa pensiun. Jika dilihat perbandingan jumlah pegawai antara kondisi tahun 2011 dengan semester 1 tahun 2012 terlihat bahwa unit kerja yang mengalami penurunan jumlah pegawai adalah Setditjen SDPPI, Direktorat Operasi Sumber Daya, dan UPT Monitoring Spektrum Frekuensi. Sementara unit kerja lain justru mengalami peningkatan jumlah pegawai seperti Direktorat Penataan Sumber Daya. Unit kerja yang tidak mengalami perubahan jumlah pegawai adalah Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan di unit kerja lain di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tabel 3.1. Perbandingan jumlah pegawai Ditjen SDPPI menurut unit kerja

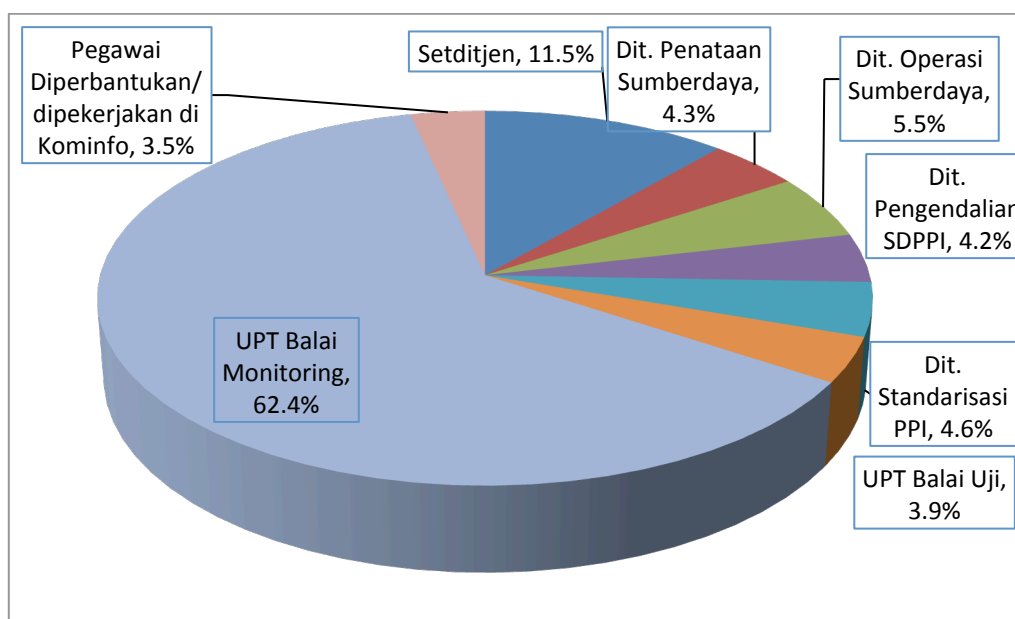
No	Unit Kerja	2011	Semster 1 2012
1	SetDirektorat Jenderal	165	159
2	Dit. Penataan Sumber daya	56	60
3	Dit. Operasi Sumber daya	79	76
4	Dit. Pengendalian SDPPI	61	58
5	Dit. Standarisasi PPI	64	64
6	UPT Balai Pengujian Perangkat	54	54
7	UPT Balai Monitoring	862	861
8	Pegawai Diperbantukan/ Dipekerjakan di Kominfo	48	48
	Jumlah	1389	1380

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal SDPPI sebanyak 1380 ini tersebut tersebar di beberapa unit kerja di Direktorat Jenderal SDPPI maupun pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan di unit kerja lain di internal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pegawai yang dipekerjakan tersebut diantaranya adalah diPusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Puslitbang SDPPI), Pusat Kelembagaan Internasional di Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika atau di unit kerja lain di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dari jumlah pegawai sebanyak 1380 orang, terbanyak adalah di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitoring Spektrum Frekuensi Radio yang mencapai 861 orang. Jumlah pegawai di UPT Monitoring Spektrum Frekuensi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan unit kerja lainnya dikarenakan Direktorat Jenderal SDPPI memiliki 35 UPT monitoring spektrum frekuensi yang tersebar di 35 kota/lokasi dalam bentuk balai, loka atau pos monitoring. Masing-masing UPT tersebut memiliki pegawai dengan jumlah yang bervariasi tergantung dari kelas UPT tersebut sehingga secara total jumlah pegawainya juga cukup banyak. Diluar UPT, jumlah pegawai Direktorat Jenderal SDPPI yang paling banyak adalah di Sekretariat Direktorat Jenderal yaitu sebanyak 159 orang, diikuti oleh Direktorat Operasi Sumber Daya sebanyak 76 orang.

Komposisi jumlah pegawai diantara unit kerja yang ada di Direktorat Jenderal SDPPI termasuk UPT menunjukkan bahwa proporsi pegawai di UPT Monitoring Spektrum Frekuensi adalah yang paling besar yaitu mencapai 62.5%, proporsi yang besar ini berasal dari seluruh pegawai di 35 UPT monitoring frekuensi yang dimiliki. Sementara untuk pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal SDPPI proporsinya mencapai 11,5% dari total pegawai, diikuti oleh Direktorat Operasi Sumber Daya. Namun proporsi pegawai diantara direktorat yang ada relatif cukup berimbang dimana proporsi pegawai yang paling kecil yaitu di UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang mencapai 3,9%.

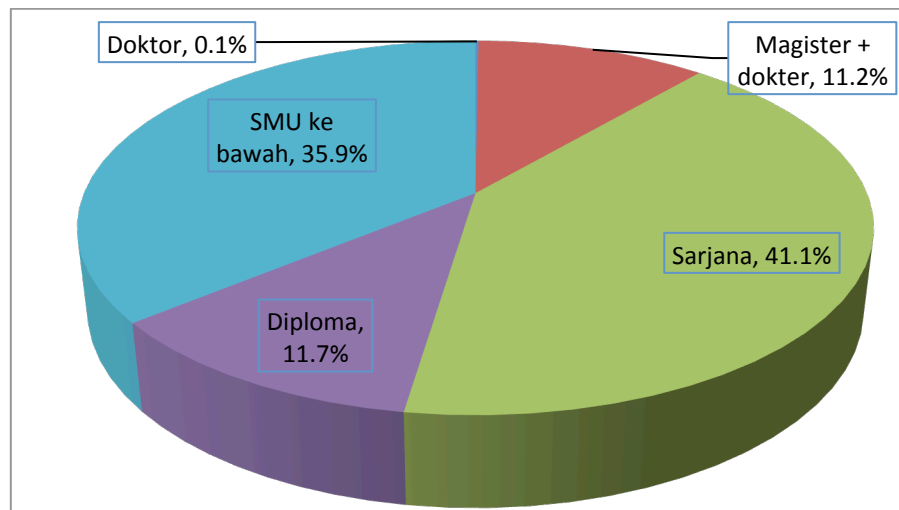
Gambar 3.1. Komposisi pegawai Direktorat Jenderal SDPPI menurut Unit Kerja.



Komposisi pegawai Direktorat Jenderal SDPPI menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa pegawai dengan pendidikan Sarjana memiliki proporsi yang paling besar yaitu sebesar 41,1% atau sebanyak 567 pegawai. Pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA ke bawah juga cukup besar proporsinya yaitu mencapai 35,9% dari total pegawai atau 496 orang. Pegawai berpendidikan Diploma mencapai 11,7% sehingga gabungan antara pegawai berpendidikan Sarjana dan Diploma proporsinya mencapai 52,8%.

Proporsi pegawai berpendidikan magister dan dokter meningkat dari 10,4% pada tahun 2011 menjadi 11,2% pada semester 1 tahun 2012. Peningkatan juga terjadi pada pegawai berpendidikan sarjana dari 38,8% pada tahun 2011 menjadi 41,1% pada semester 1 tahun 2012. Sementara komposisi pegawai berpendidikan SMA ke bawah menurun proporsi dari 38,8% pada tahun 2011 menjadi tinggal 35,9% pada semester 1 tahun 2012. Trend perubahan proporsi ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pegawai di Direktorat Jenderal SDPPI melalui peningkatan jenjang pendidikan pegawainya.

Gambar 3.2. Komposisi pegawai Direktorat Jenderal SDPPI menurut Tingkat Pendidikan



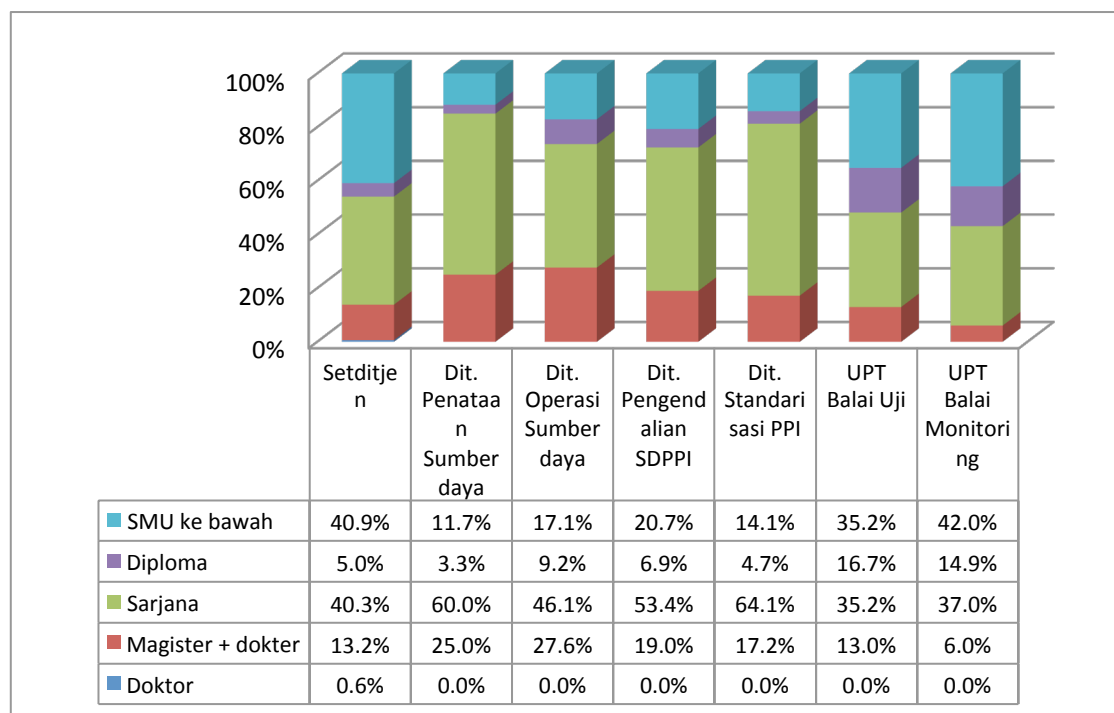
Komposisi kepegawaian menurut jenjang pendidikan di masing-masing unit kerja menunjukkan pegawai berpendidikan magister banyak terdapat di Sekretariat Direktorat Jenderal dan di Direktorat Operasi sumberdaya selain di UPT Monitoring Spektrum Perangkat. Jumlah pegawai berpendidikan magister yang banyak di UPT Monitoring spektrum perangkat dikarenakan jumlah unit kerja yang banyak yaitu 35 UPT ang tersebar di seluruh Indonesia, dimana masing-masing ada yang memiliki pegawai berpendidikan magister. Sehingga jumlah pegawai untuk masing-masing jenjang pendidikan juga aling banyak terdapat di UPT Monitoring spektrum frekuensi. Namun dengan jumlah pegawai yang tidak terlalu banyak, pegawai berpendidikan magister ternyata cukup banyak di Direktorat Operasi Sumberdaya.

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal SDPPI menurut Pendidikan semester 1-2011.

No	Unit Kerja	S3	Magister+dokter	S1	Diploma	SLTA ke bawah	Jumlah
1	Setditjen SDPPI	1	21	64	8	65	159
2	Dit. Penataan Sumber daya	0	15	36	2	7	60
3	Dit. Operasi Sumber daya	0	21	35	7	13	76
4	Dit. Pengendalian SDPPI	0	11	31	4	12	58
5	Dit. Standarisasi PPI	0	11	41	3	9	64
6	UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	0	7	19	9	19	54
7	UPT Monitoring Spektrum Frekuensi Radio	0	52	319	128	362	861
8	Pegawai Diperbantukan/ Dipekerjakan di Kominfo	1	16	22	0	9	48
	Jumlah	2	154	567	161	496	1380

Jika dilihat proporsinya menurut jenjang pendidikan di masing-masing unit kerja, jumlah pegawai berpendidikan sarjana dan magister paling sedikit terdapat di UPT Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Komposisi pegawai di UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio seperti diperlihatkan pada gambar 3.3 menunjukkan proporsi pegawai berpendidikan Sarjana baru mencapai 37% dan hanya 6% pegawai berpendidikan S2/S3 dari total pegawai di UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang cukup besar. Namun proporsi ini mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya dimana total proporsi pegawai berpendidikan sarjana, magister dan doktor hanya 37%. Sementara di UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dengan jumlah pegawai yang lebih kecil, proporsi pegawai berpendidikan sarjana juga baru mencapai 35,2% dan pegawai berpendidikan S2/S3 baru mencapai 13%. Pada saat yang sama proporsi pegawai berpendidikan sarjana di Direktorat di Ditjen SDPPI mencapai lebih dari 45% dan pegawai dengan pendidikan magister atau doktor sudah mencapai lebih dari 17%. Bahkan di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, proporsi pegawai berpendidikan sarjana mencapai 64.1%, sementara di Direktorat Operasi Sumber Daya, pegawai berpendidikan S2/S3 mencapai 27,6% dari total pegawai.

Gambar 3.3. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal SDPPI menurut Tingkat Pendidikan Unit kerja



Sementara di Sekretariat Direktorat Jenderal dengan jumlah pegawai 159 orang (terbanyak kedua setelah UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio), proporsi pegawai berpendidikan Sarjana telah mencapai 40,3%. Sementara pegawai berpendidikan S2/S3 dan dokter di unit kerja ini proporsinya baru 13,8%. Proporsi pegawai berpendidikan sarjana dan magister/dokter di Sekretariat Ditjen SDPPI ini jugamengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang menandakan terjadinya peningkatan kualitas sumberdaya pegawai dari sisi jenjang pendidikan. Proporsi pegawai berpendidikan SLTA ke bawah menurun dari 44,2% pada tahun 2011 menjadi 40,9%. Proporsi pegawai yang berpendidikan sekolah menengah SMU ke bawah yang masih cukup tinggi terdapat di UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang masing-masing mencapai 42% dan 35,2%. Dari komposisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa untuk unit kerja tertentu seperti yang terkait dengan pengelolaan dan manajemen frekuensi serta standarisasi perangkat membutuhkan pegawai dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Namun secara umum dari komposisi pegawai menurut pendidikan, kualifikasi tingkat pendidikan pegawai di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tergolong cukup tinggi dimana pegawai berpendidikan sarjana dan pasca sarjana mencapai hampir 50%.

3.3. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Ditjen SDPPI

3.3.1. Jumlah dan Komposisi Pegawai

UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah salah satu dari dua jenis UPT yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio ini terdiri dari 35 UPT monitoring yang tersebar di seluruh Indonesia yang mencakup Balai/Loka/Pos Monitoring. UPT monitor spektrum frekuensi radio memiliki fungsi utama melakukan monitoring terhadap penggunaan frekuensi oleh berbagai pihak dalam rangka pengaturan pemanfaatan frekuensi secara benar. Tugas ini dilakukan melalui keberadaan unit-unit monitoring di daerah yang berbentuk balai, loka maupun posdengan berbagai tingkatan.

Jumlah pegawai UPT secara total (bersama dengan UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi) pada semester 1 2012 mengikuti tren penurunan jumlah pegawai seperti

yang terjadi pada tahun sebelumnya. Dengan jumlah total pegawai 915 orang, berarti berkurang 3 pegawai dibanding tahun sebelumnya. Padahal selama periode 2007-2010 jumlah pegawai di UPT justru mengalami peningkatan signifikan. Pada sisi yang lain, adanya kebutuhan monitoring spektrum frekuensi maupun perangkat yang semakin meningkat sejalan dengan semakin tingginya penggunaan spektrum frekuensi dan perangkat, mendorong untuk adanya penambahan loka/pos monitoring. Penurunan jumlah pegawai UPT ini diduga masih melanjutkan dampak dari perubahan struktur organisasi yang terjadi pada unit kerja induknya yang semula berada di bawah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan sejak tahun 2011 dimekarkan menjadi dua Direktorat Jenderal serta adanya pegawai-pegawai yang memasuki masa pensiun dan belum ada penambahan pegawai baru untuk UPT.

Tabel 3.5. Perkembangan Jumlah Pegawai UPT Direktorat Jenderal SDPPI Menurut Tingkat Pendidikan.

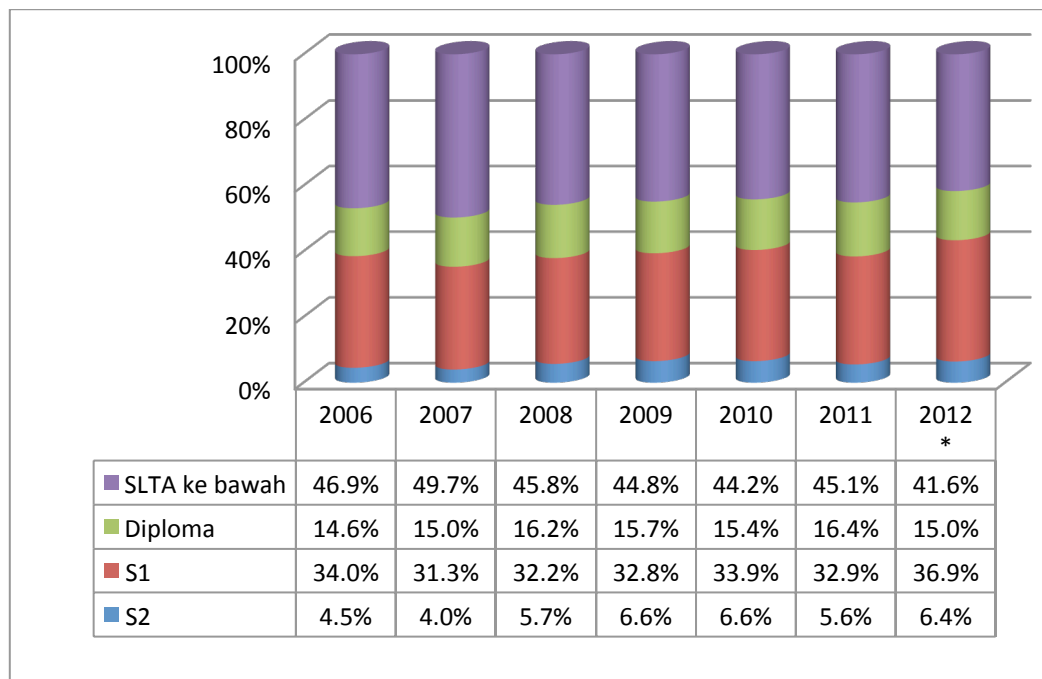
No	Tahun	S2	S1	Diploma	SLTA ke bawah	Jumlah
1	2006	32	240	103	331	706
2	2007	27	211	101	335	674
3	2008	48	270	136	384	838
4	2009	58	290	139	396	883
5	2010	63	325	148	424	960
6	2011	51	302	151	414	918
7	2012*	59	338	137	381	915

*) sampai Maret 2012

Dari sisi komposisinya, sampai semester 1 2012 terjadi perkembangan yang positif dimana proporsi pegawai berpendidikan sarjana mengalami peningkatan signifikan dan menjadi yang terbesar dibanding pegawai dengan jenjang pendidikan lainnya. Proporsi pegawai berpendidikan sarjana mencapai 36,9% atau telah melebihi proporsi pegawai berpendidikan SLTA yang sebelumnya menjadi yang terbesar. Namun jika pegawai berpendidikan SLTA digabung dengan jenjang pendidikan dibawahnya proporsinya mencapai 41,6%. Proporsi ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang masih mencapai 45,1%. Sejalan dengan peningkatan proporsi pegawai berpendidikan sarjana, proporsi pegawai UPT berpendidikan diploma juga menurun dari 16,4% pada tahun 2011 menjadi 15% pada semester 1-2012. Peningkatan juga terjadi untuk pegawai berpendidikan pascasarjana yang proporsinya meningkat dari 5,6% pada tahun 2011 menjadi 6,4% pada semester 1-2012. Struktur

organisasi dan kepegawaian di Direktorat Jenderal SDPPI yang mulai stabil dan tidak banyak perpindahan pegawai menjadi salah satu faktor mulai meningkatnya jumlah pegawai dengan pendidikan yang lebih tinggi seperti sarjana dan pasca sarjana.

Gambar 3.7. Perkembangan Komposisi Pegawai UPT menurut pendidikan 2006- semester 1 2012



3.5.2. Pegawai UPT Monitor Spektrum FrekuensiRadio (UPT Monfрек)

Khusus untuk pegawai di UPT Monitoring Spektrum frekuensi, distribusi jumlah pegawai menurut UPT yang tersebar di 35 lokasi menunjukkan adanya variasi jumlah pegawai antar UPT. Variasi ini sesuai dengan kelas dari UPT Monitoring Spektrum Frekuensi di masing-masing daerah. UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri dari beberapa kelas yaitu Balai Monitoring Kelas 1, Balai Monitoring Kelas 2, Loka Monitoring, dan Pos Monitoring sesuai dengan beban kerja monitoringnya. UPT dengan beban kerja yang besar karena tingginya penggunaan spektrum frekuensi radio di daerah tersebut seperti UPT Bandung, UPT Semarang, UPT Surabaya, termasuk UPT Jakarta memiliki jumlah pegawai lebih banyak (40 sampai 46 orang). Terjadi peningkatan yang signifikan komposisi pegawai berpendidikan Sarjana dan pascasarjana di 2 UPT yang cukup besar yaitu UPT Jakarta dan UPT Bandung yang semula proporsinya relatif rendah. Pegawai berpendidikan sarjana dan magister di UPT Jakarta meningkat dari 23,3% pada 2011 menjadi 31,7% pada semester 1-2011. Sementara proporsi pegawai berpendidikan Sarjana dan magister di UPT Bandung meningkat dari 30%

pada 2011 menjadi 41,4%. Sementara untuk UPT Semarang dan Surabaya proporsinya mencapai 66,7 % dan 50%.

Pada beberapa UPT di daerah dengan tingkat penggunaan frekuensi yang tidak terlalu besar dengan dinamika sosial ekonomiserta tingkat kemajuan daerah yang tidak terlalu tinggi, jumlah pegawai di UPT tersebut juga cenderung tidak besar. UPT Kendari, UPT Gorontalo, UPT Ambon, UPT Ternate, UPT Palangkaraya dan UPT Banjarmasin memiliki jumlah pegawai yang sedikit (kurang dari 20 orang). Hal ini terkait dengan beban monitoring frekuensi yang relatif lebih sedikit dibanding UPT lainnya. Tabel 3.5 juga menunjukkan bahwa pada UPT dengan jumlah pegawai antara 10 sampai 20 orang, proporsi jumlah pegawai dengan pendidikan Sarjana dan magister saat ini sudah lebih baik yaitu mencapai 29% sampai 37% dibanding tahun 2011 yang berkisar 15% sampai 42%. Namun untuk Palangkaraya, proporsi pegawai berpendidikan sarjana dan magister masih rendah yaitu hanya 16%. Secara total, proporsi pegawai berpendidikan Sarjana dan Magister di UPT Monitoring spektrum frekuensi kini mencapai 42,9%, meningkat dari kondisi 2011 yang hanya 37,8%. Proporsi ini sedikit lebih tinggi dari pegawai yang baru berpendidikan SLTA ke bawah yang mencapai 41,5%. Peningkatan jumlah pegawai yang berpendidikan Sarjana dan Magister ini merupakan upaya dari UPT untuk meningkatkan kinerja monitoring dan penertiban penggunaan frekuensi yang semakin tinggi dan kompleks.

Tabel 3.5. Jumlah pegawai masing-masing UPT Monfrek menurut Tingkat Pendidikan

No	UPT	S2	S1	Diploma	SLTA ke bawah	Jumlah
1	UPT NAD	1	7	5	10	23
2	UPT MEDAN	0	12	1	21	34
3	UPT PADANG	0	6	3	18	27
4	UPT PEKANBARU	1	6	6	8	21
5	UPT JAMBI	2	6	8	8	24
6	UPT BABEL	1	2	5	10	18
7	UPT BATAM	1	15	4	5	25
8	UPT PALEMBANG	3	15	2	5	25
9	UPT BENGKULU	1	8	6	5	20
10	UPT LAMPUNG	2	8	4	8	22
11	UPT DKI JAKARTA	2	11	3	25	41
12	UPT BANTEN	3	12	2	11	28

No	UPT	S2	S1	Diploma	SLTA ke bawah	Jumlah
13	UPT BANDUNG	3	14	3	21	41
14	UPT YOGYAKARTA	3	15	1	20	39
15	UPT SEMARANG	5	25	5	10	45
16	UPT SURABAYA	4	17	1	20	42
17	UPT DENPASAR	2	11	5	12	30
18	UPT MATARAM	0	9	4	14	27
19	UPT KUPANG	0	10	6	15	31
20	UPT SAMARINDA	2	7	4	9	22
21	UPT BALIKPAPAN	1	9	4	8	22
22	UPT PONTIANAK	2	7	5	11	25
23	UPT PALANGKARAYA	1	2	6	9	18
24	UPT BANJARMASIN	1	5	3	9	18
25	UPT MANADO	1	13	2	7	23
26	UPT PALU	2	12	2	5	21
27	UPT MAKASAR	3	17	5	12	37
28	UPT AMBON	2	5	2	8	17
29	UPT GORONTALO	1	5	6	2	14
30	UPT TERNATE	0	6	4	6	16
31	UPT KENDARI	1	4	4	8	17
32	UPT JAYAPURA	0	9	5	7	21
33	UPT MERAUKE	0	2	5	7	14
34	UPT Tahuna	0	4	1	1	6
35	UPT Sorong	0	3	2	2	7
	Jumlah	51	319	134	357	861

3.5.3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Untuk mendukung kegiatan monitoring dan penertiban serta pelayanan yang dilakukan oleh unit kerja yang ada di Ditjen SDPPI, maka unit kerja tersebut juga didukung dengan pegawai yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Keberadaan PPNS ini terkait dengan salah satu tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia maupun kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal SDPPI. Khusus untuk UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio,

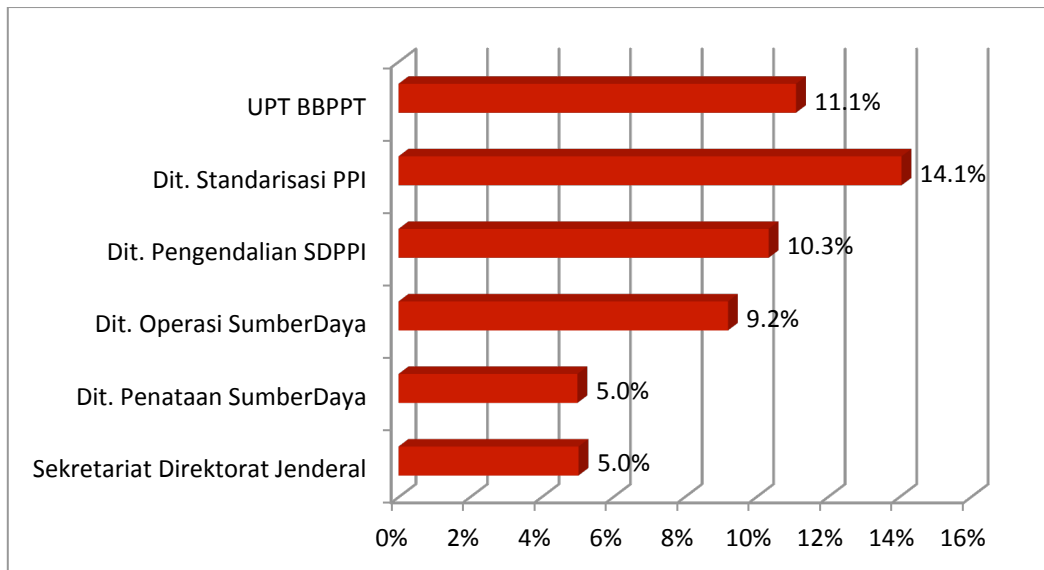
keberadaan PPNS ini juga menjadi penting untuk mendukung tugas monitoring dan penertiban frekuensi dan perangkat yang dilakukan oleh UPT.

Secara total, jumlah PPNS yang ada di Direktorat Jenderal SDPPPI sebanyak 291 termasuk yang tersebar di UPT Monitoring Spektrum Frekuensi di seluruh Indonesia. Sementara jumlah PPNS diluar UPT Monitoring spektrum frekuensi berjumlah 39 orang. Jumlah PPNS di Direktorat Jenderal SDPPPI ini mencapai sekitar 21,6% dari total pegawai yang ada di Ditjen SDPPPI. Diantara unit kerja yang ada di pusat, Tabel 3.6 menunjukkan bahwa selain di UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio, jumlah PPNS paling banyak terdapat di Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika yaitu sebanyak 7 orang. Sementara PPNS di Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Operasi Sumber Daya jumlahnya hanya 7 orang. PPNS paling sedikit terdapat di Direktorat Penataan Sumber Daya yang jumlahnya hanya 3 orang. Jika dilihat proporsinya terhadap jumlah pegawai yang ada di unit kerja tersebut, proporsi terbesar juga berada di Direktorat Standardisasi PPI sebesar 14,1% dan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasisebesar 11,1%.

Tabel 3.6. Jumlah PPNS menurut unit kerja selain UPT Monfrek.

No	Unit Kerja	PPNS	Total Pegawai
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	8	159
2	Dit. Penataan SumberDaya	3	60
3	Dit. Operasi SumberDaya	7	76
4	Dit. Pengendalian SDPPI	6	58
5	Dit. Standarisasi PPI	9	64
6	BBPPT	6	54

Gambar 3.8. Proporsi PPNS terhadap Pegawai di unit kerja selain UPT Monfrek



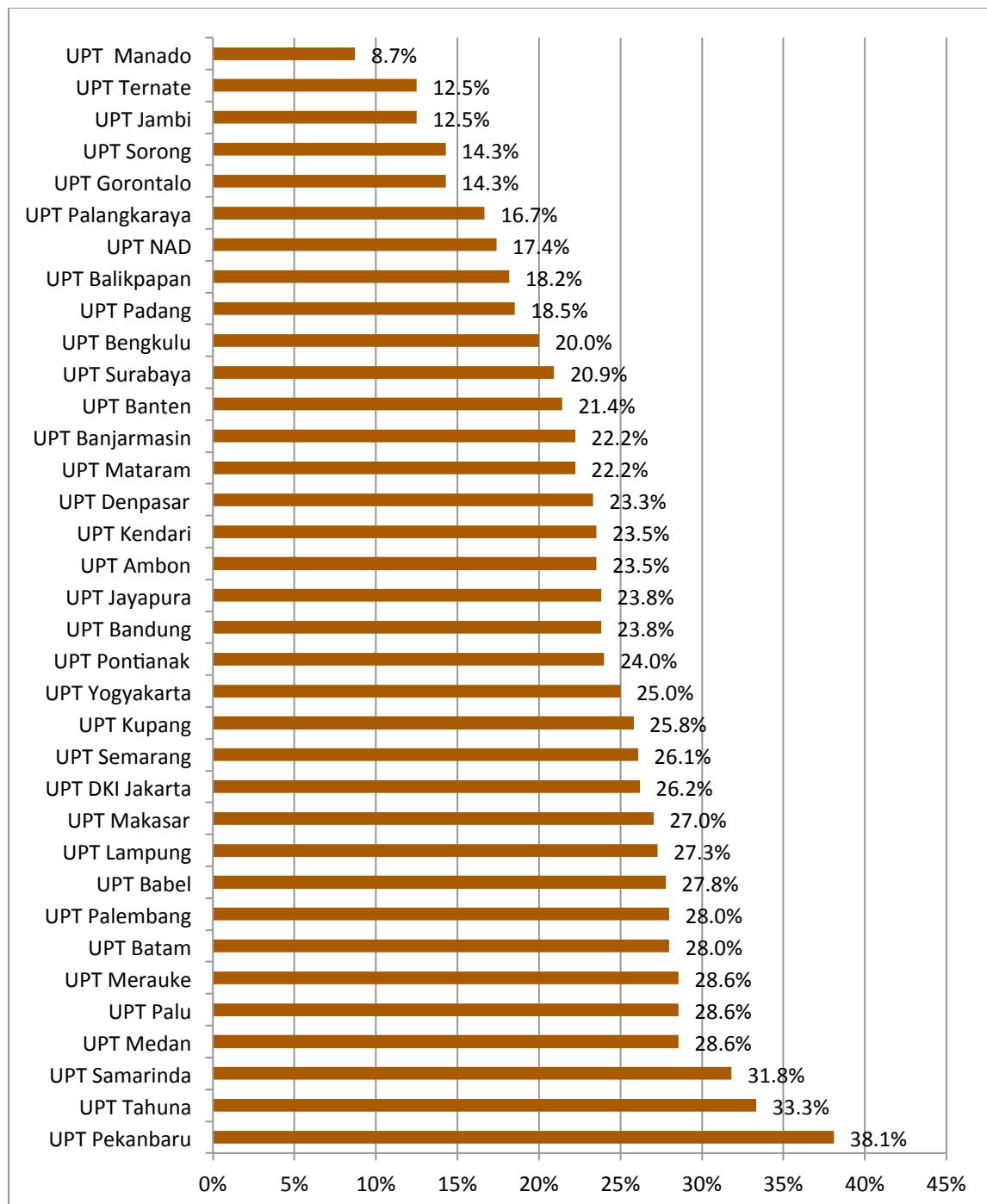
Secara khusus, UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Monfrek) yang memiliki tugas melakukan monitoring dan penertiban frekuensi juga memiliki tenaga PPNS di masing-masing UPT yang melakukan tugas monitoring dan penertiban penggunaan frekuensi di wilayah kerjanya. Jumlah PPNS di UPT seperti ditunjukkan tabel 3.7 menunjukkan jumlah yang bervariasi dan memiliki korelasi dengan jumlah pegawai pada UPT tersebut. UPT dengan jumlah pegawai yang banyak yang biasanya terdapat pada kota-kota besar, memiliki jumlah PPNS yang relatif lebih banyak juga. Jumlah PPNS yang paling banyak terdapat di UPT Monfrek Semarang dan UPT Jakarta karena intensitas penggunaan frekuensi yang juga cukup tinggi pada kedua daerah tersebut. Jumlah PPNS yang cukup banyak juga terdapat di kota besar lain dengan dinamika kota yang tinggi seperti Medan, Yogyakarta dan Makassar. Sampai semester 1-2012 ini semua UPT sudah memiliki PPNS setelah sebelumnya meskipun jumlahnya masih sedikit seperti UPT Sorong yang hanya memiliki 1 PPNS dan UPT Tahuna, UPT Ternate, UPT Manado dan UPT Gorontalo yang hanya memiliki 2 PPNS.

Tabel 3.7. Jumlah PPNS dan Pegawai pada masing-masing UPT Monitoring Frekuensi

No	UPT	PPNS	Total Pegawai	No	UPT	PPNS	Total Pegawai
1	UPT NAD	4	23	19	UPT Kupang	8	31
2	UPT Medan	10	35	20	UPT Samarinda	7	22
3	UPT Padang	5	27	21	UPT Balikpapan	4	22
4	UPT Pekanbaru	8	21	22	UPT Pontianak	6	25
5	UPT Jambi	3	24	23	UPT Palangkaraya	3	18
6	UPT Babel	5	18	24	UPT Banjarmasin	4	18
7	UPT Batam	7	25	25	UPT Manado	2	23
8	UPT Palembang	7	25	26	UPT Palu	6	21
9	UPT Bengkulu	4	20	27	UPT Makasar	10	37
10	UPT Lampung	6	22	28	UPT Ambon	4	17
11	UPT DKI Jakarta	11	42	29	UPT Gorontalo	2	14
12	UPT Banten	6	28	30	UPT Ternate	2	16
13	UPT Bandung	10	42	31	UPT Kendari	4	17
14	UPT Yogyakarta	10	40	32	UPT Jayapura	5	21
15	UPT Semarang	12	46	33	UPT Merauke	4	14
16	UPT Surabaya	9	43	34	UPT Tahuna	2	6
17	UPT Denpasar	7	30	35	UPT Sorong	1	7
18	UPT Mataram	6	27	36	Balai Uji	6	54

Proporsi jumlah PPNS terhadap jumlah pegawai di UPT juga menunjukkan variasi meskipun tidak terlalu besar perbedaannya antar UPT serta menunjukkan proporsionalitas sesuai kondisi daerah. Proporsi jumlah PPNS di UPT terhadap jumlah total pegawai di UPT tersebut bervariasi antara yang terendah 8,7% di UPT Manado sampai dengan yang tertinggi 38,1% di UPT Pekanbaru. Proporsi jumlah PPNS yang besar di suatu UPT tidak selalu berarti jumlah PPNS yang banyak di daerah tersebut. Meskipun jumlah PPNS hanya 2 orang, proporsi PPNS yang tinggi di UPT Tahuna lebih disebabkan jumlah pegawai UPT Tahuna yang sedikit. Proporsi jumlah PPNS terhadap jumlah pegawai UPT yang juga besar terdapat di UPT Medan dan UPT Batam yang keduanya berada di wilayah Sumatera bagian utara. Proporsi yang cukup besar ini karena jumlah pegawai di kedua UPT tersebut yang tidak terlalu banyak sementara jumlah PPNS-nya cukup banyak. Di sisi lain pada UPT dengan jumlah PPNS yang cukup besar, proporsinya berada pada kisaran 23%-28%.

Gambar 3. 9. Proporsi PPNS terhadap Pegawai di UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio



Proporsi PPNS yang rendah justru terdapat di UPT Ternate, UPT Gorontalo dan UPT Jambi yang hanya kurang dari 15% karena jumlah PPNS di kedua UPT tersebut yang memang sedikit. Proporsi PPNS yang relatif lebih besar di UPT Pekanbaru dan UPT Batam diharapkan sejalan dengan kinerja dari UPT tersebut dalam melakukan monitoring dan penertiban terhadap pelanggaran penggunaan perangkat maupun sumber daya spektrum frekuensinya di wilayah tersebut yang berkembang sangat dinamis. Proporsi yang relatif besar ini proporsional dengan wilayah kerja dari UPT Pekanbaru dan UPT Batam yang luas ataupun

tersebar dalam pulau-pulau meskipun dari sisi penggunaan frekuensi tidak terlalu besar. Perbandingan antara jumlah pegawai, luas wilayah kerja dan beban penggunaan frekuensi yang dimonitor akan ditunjukkan pada bagian lain dalam buku statistik ini.

3.5.4. Pegawai Pejabat Fungsional

Selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, di UPT Monfrek juga terdapat pegawai pejabat fungsional yaitu untuk fungsional pengendali frekuensi. Jumlah pejabat fungsional pengendali frekuensi ini bervariasi antar UPT Monfrek dan tidak berbanding lurus dengan jumlah total pegawai UPT Monfrek. UPT Monfrek Jambi dengan jumlah pegawai 24 orang memiliki 7 orang pejabat fungsional pengendali frekuensi. Sementara UPT Padang dengan jumlah pegawai 27 orang hanya memiliki 3 orang pejabat fungsional pengendali frekuensi. Jumlah pejabat fungsional pengendali frekuensi terbanyak terdapat di UPT Monfrek Yogyakarta dan UPT Monfrek Makassar dengan 13 pejabat fungsional diikuti UPT Monfrek Jakarta dengan 12 pejabat fungsional dan UPT Monfrek Palembang dengan 11 pejabat fungsional.

Tabel 3.7. Jumlah PPNS dan Pegawai pada masing-masing UPT Monitoring Frekuensi

No	UPT	PPNS	Total Pegawai	No	UPT	PPNS	Total Pegawai
1	UPT NAD	2	23	19	UPT Kupang	5	31
2	UPT Medan	7	35	20	UPT Samarinda	6	22
3	UPT Padang	3	27	21	UPT Balikpapan	6	22
4	UPT Pekanbaru	3	21	22	UPT Pontianak	4	25
5	UPT Jambi	7	24	23	UPT Palangkaraya	5	18
6	UPT Babel	6	18	24	UPT Banjarmasin	4	18
7	UPT Batam	5	25	25	UPT Manado	1	23
8	UPT Palembang	11	25	26	UPT Palu	5	21
9	UPT Bengkulu	8	20	27	UPT Makasar	13	37
10	UPT Lampung	6	22	28	UPT Ambon	5	17
11	UPT DKI Jakarta	12	42	29	UPT Gorontalo	0	14
12	UPT Banten	6	28	30	UPT Ternate	3	16
13	UPT Bandung	9	42	31	UPT Kendari	3	17
14	UPT Yogyakarta	13	40	32	UPT Jayapura	2	21
15	UPT Semarang	9	46	33	UPT Merauke	4	14
16	UPT Surabaya	5	43	34	UPT Tahuna	0	6
17	UPT Denpasar	4	30	35	UPT Sorong	0	7
18	UPT Mataram	2	27	36			

Beberapa UPT Monfrek belum memiliki pejabat fungsional pengendali frekuensi seperti UPT Sorong, UPT Tahuna dan UPT Gorontalo. Ketiga UPT Monfrek yang tidak memiliki pejabat fungsional pengendali frekuensi ini adalah UPT yang jumlah pegawainya sedikit dan berstatus Loka Monitoring atau Pos Monitoring. Namun untuk UPT Monfrek Gorontalo memiliki pegawai yang jumlahnya sama dengan UPT Monfrek Merauke yang memiliki 4 pejabat fungsional pengendali frekuensi. Intensitas penggunaan frekuensi di wilayah kerja UPT Monfrek menjadi salah satu pertimbangan penempatan pejabat pengendali frekuensi di suatu UPT.

Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada di UPT Monfrek, proporsi terbesar jumlah pejabat fungsional terdapat di UPT Palembang diikuti oleh UPT Bengkulu. Kedua UPT Monfrek ini memiliki jumlah pejabat fungsional yang relatif cukup banyak sementara jumlah keseluruhan pegawainya termasuk yang tidak besar. Sementara untuk UPT Monfrek yang memiliki jumlah pejabat fungsional besar seperti UPT Monfrek Yogyakarta, UPT Monfrek Makassar dan UPT Monfrek DKI Jakarta, proporsinya yang cukup besar hanya di UPT Makassar dan UPT Yogyakarta yang mencapai lebih dari 30%. Sementara UPT Monfrek DKI Jakarta proporsi jumlah pejabat fungsional pengendali frekuensinya terhadap total pegawai hanya sebesar 28,6%. UPT Monfrek Jayapura, Nangroe Aceh Darussalam, Mataram dan Manado hanya memiliki proporsi pejabat fungsional pengendali frekuensi terhadap jumlah pegawai yang kurang dari 10%.

Gambar 3. 10. Proporsi Pejabat Fungsional Pengendali Frekuensi terhadap Pegawai di UPT Monfrek

